



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 29 Juli 2010

Halaman: 1

Media Massa : *Bernas* Hari : *Kamis* Tanggal : *29 Juli 2010* Halaman :

Diserahkan Wapres di Jakarta

Pemkot Terima Penghargaan Akuntansi Pelaporan Keuangan



ISTIMEWA

TERIMA PENGHARGAAN -- Wakil Walikota Haryadi Suyuti menerima penghargaan bagi Pemkot Yogyakarta dalam pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari pemerintah pusat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Boediono di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (27/7).

JOGJA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerima penghargaan dalam pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari pemerintah pusat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Boediono di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (27/7).

Penghargaan itu diberikan atas keberhasilan Pemkot Yogyakarta dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2009 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yakni Wajar Tanpa Pengecualian. Penghargaan diterima oleh Wakil Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.

Usai menerima penghargaan, Haryadi Suyuti menyatakan, penilaian wajar tanpa pengecualian wajib dipertahankan sebagai dasar tata kelola keuangan yang baik selanjutnya. Penghargaan itu merupakan capaian yang membanggakan dan menjadi semangat bagi Pemkot Yogyakarta untuk meneruskan tata kelola keuangan yang baik ini.

Pemkot Yogyakarta menerima penghargaan bersama 45 lembaga pemerintah dan 13 Pemerintah Daerah. Antara lain Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Banda Aceh, Pemkot Sabang, Pemkot Lhokseumawe, Pemkab Aceh Tengah, Pemkab Tanah Datar, Pemkab Sungai Penuh, Pemkab Muko Muko, Pemkab Kaur, Pemkab Tangerang, Pemkot Tangerang dan Pemkab Gorontalo.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo mengatakan, saat ini kualitas pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah mengalami kecenderungan membaik. Pada 2006 BPK hanya memberi opini wajar tanpa pengecualian pada 3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atau 1 persen, pada 2008 membaik menjadi 12 LKPD (3%) dan pada 2009 ini menjadi 13 LKPD.

Ditambahkan Hadi, kepada 45 lembaga dan 13 Pemda yang telah menerima opini wajar tanpa pengecualian, pihaknya berharap agar dapat menjadi motivasi untuk terus membenahi sistem pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan dan barang yang menjadi tanggungjawabnya.

"Hal ini karena laporan yang berkualitas bukan dihasilkan dengan cara-cara instan namun melalui sistem akuntansi yang handal (reliable), serta melalui data yang dapat ditelusuri (traceable) dan layak audit," kata dia. (*t16)

Dihaturkan Kepada Yth. :
 1. Walikota Yogyakarta
 2. Wakil Walikota Yogyakarta
 3. Sekretaris Daerah
 4. Asisten

Embusan Kepada Yth. :
 Instansi : Dalam kesempatan itu lanjut

1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk ditanggapi
---------	----------------------------------	--------------------------------------	---

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005